BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi *forward-looking* adalah informasi yang membantu pemangku kepentingan melakukan evaluasi kinerja masa depan perusahaan dan memberikan prediksi bisnis di masa depan (Alkhatib, 2014). Informasi *forward-looking* terdiri atas informasi keuangan dan informasi non-keuangan (Aljifri dan Hussainey, 2007). Dalam kondisi ekonomi yang semakin berkembang dengan pesat, kebutuhan investor juga semakin bervariasi. Investor membutuhkan berbagai macam informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Investor tentunya akan berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai kinerja masa depan yang baik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016) berdasarkan Surat Edaran Nomor 30/SEOJK.04/2016 menyatakan bahwa informasi forward-looking merupakan informasi minimum yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan. Informasi forward-looking yang harus diungkapkan mencakup informasi tentang prospek perusahaan terkait kondisi ekonomi secara umum, industri, dan pasar internasional; serta target/proyeksi mengenai penjualan atau pendapatan, laba (rugi) yang ditargetkan, struktur modal yang diharapkan, kebijakan pembagian dividen, atau hal lainnya yang dinilai penting bagi perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang. Pengungkapan informasi forward-looking mungkin dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi perusahaan atas transparansi, keandalan, dan kredibilitas (Menicucci dan Paolucci, 2018). Meskipun informasi forward-looking memiliki peran penting dan sudah ada peraturan yang berlaku, pengungkapan informasi forward-looking perusahaan di Indonesia masih rendah. Penelitian Maghfira dan Tresnaningsih (2017) menunjukkan bahwa rata-rata hanya 32,6% perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan pengungkapan informasi forwardlooking.

Uyar dan Kilic (2012) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi forward-looking yang rendah dapat disebabkan karena adanya pesimisme dalam ekspetasi masa depan, timbulnya biaya litigasi atas perkiraan yang salah, adanya pengungkapan informasi forward-looking yang dapat melemahkan posisi kompetitif. Aljifri dan Hussainey (2007) menyatakan bahwa terdapat kesulitan untuk memprediksi kinerja di masa depan dengan akurat karena terdapat ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Informasi forward-looking yang diungkapkan perusahaan cenderung berupa informasi forward-looking kualitatif dan bukan informasi forward-looking kuantitatif (Kent dan Ung, 2003; Uyar dan Kilic, 2012; Kilic dan Kuzey, 2018). Alasan perusahaan cenderung melakukan pengungkapan informasi forward-looking kualitatif yaitu karena perusahaan menghindari timbulnya biaya litigasi atas proyeksi yang salah dan tidak memberikan informasi yang membuat rugi suatu pihak (Uyar dan Kilic, 2012). Hal ini dapat terjadi jika manajer yakin akan adanya sanksi karena hukum tidak dapat membedakan antara kesalahan perkiraan karena ketidakpastian atau karena bias manajemen (Healy dan Palepu, 2001). Hal tersebut menyebabkan litigasi dapat mengurangi dorongan terhadap manajer untuk melakukan pengungkapan informasi forward-looking (Healy dan Palepu, 2001).

Pengungkapan informasi *forward-looking* yang dilakukan perusahaan cenderung merupakan pengungkapan kabar baik sehingga dapat menimbulkan bias dalam pengungkapan informasi *forward-looking* (Clarkson, dkk., 1994). Arti dari kabar baik yaitu kondisi perusahaan di masa depan yang memberikan dampak positif kepada perusahaan maupun investor. Seperti penelitian Bujaki, dkk. (1999; dalam Aljifri dan hussainey, 2007) yang menyatakan bahwa terdapat 97,5% kabar baik dari informasi *forward-looking* yang diungkapkan. Penelitian Uyar dan Kilic (2012) menunjukkan hasil bahwa seluruh perusahaan sampel penelitian mengungkapkan kabar baik dari informasi *forwad-looking*. Kent dan Ung (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan laba yang stabil cenderung melakukan pengungkapan informasi *forward-looking* lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil dengan laba yang tidak stabil.

Mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran yang positif dalam memonitor kebijakan pengungkapan perusahaan dan mendorong menuju

lingkungan informasi yang transparan (Healy dan Palepu, 2001). Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan aspek utama untuk transparansi pengungkapan informasi yang lebih baik (Dzaraly, dkk., 2018). Karamanaou dan Vafeas (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan standar tata kelola yang tinggi cenderung memberikan pengungkapan sukarela informasi forward-looking. Definisi tata kelola perusahaan adalah hubungan antara direksi, pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk dapat meyakinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya bahwa hak mereka terlindungi (Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, 2015). Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan diperlukan supaya pasar transparan, efisien, dan konsisten dengan peraturan perundangan. kelola perusahaan bertujuan untuk membantu terciptanya lingkungan yang dilandasi kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk membina investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, sehingga mendukung pertumbuhan. Tata kelola perusahaan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja organisasi agar lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Karamanou dan Vafeas (2005) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur dewan dan komite audit yang efektif cenderung mengungkapkan informasi prospektif (yang diproksikan dengan perkiraan laba). Penelitian O'Sullivan, dkk. (2008), memberikan hasil bahwa tata kelola perusahaan (yang diproksikan dengan keberadaan dan independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audir, auditor, dan independensi auditor) memberikan dampak positif terhadap pengungkapan informasi forward-looking yang diproksikan dengan perkiraan penjualan. Penelitian ini menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemilikan manajerial, direktur independen, dan ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit.

Mekanisme tata kelola kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengawasi manajemen (Eng dan Mak, 2003). Dalam penerapannya, manajer memiliki kepentingan pribadi dan cenderung untuk memenuhi kepentingannya dibanding dengan kepentingan perusahaan. Adanya informasi lebih banyak yang dimiliki oleh manajer membuat

manajer enggan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Penelitian Karamanou dan Vafeas (2005) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang rendah berpengaruh terhadap perkiraan manajemen laba yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dzaraly, dkk. (2018) dan Wang dan Hussainey (2013), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang semakin tinggi menyebabkan pengungkapan informasi *forward-looking* semakin rendah. Sebaliknya, penelitian Liu (2015) tidak menemukan adanya hubungan kepemilikan manajerial dengan pengungkapan *forward-looking*. Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan saham manajer atas perusahaan yang kecil.

Mekanisme tata kelola direktur independen dianggap lebih efektif dalam melakukan monitor terhadap manajemen (Chan, dkk., 2013). Direktur independen adalah direktur perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direksi dalam perusahaan lain (Kep-00001/BEI/01-2014). Direktur independen dapat menjadi penengah dalam konflik kepentingan serta menjadi penengah dalam manajemen (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Cadburry (1992) menyatakan bahwa direktur independen non eksekutif dapat meningkatkan transparansi secara efektif. Pengungkapan informasi forward-looking yang diatur OJK menandakan adanya transparansi informasi perusahaan (Maghfira dan Tresnaningsih, 2017). Dengan adanya direktur independen dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan dengan cara meningkatkan informasi forward-looking. Penelitian Liu (2015) memberikan hasil bahwa direktur independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi forward-looking. Sebaliknya, penelitian Al-Najjar dan Abed (2014) menunjukkan hasil bahwa direktur independen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan informasi forwardlooking. Hal ini disebabkan karena lemahnya peran direktur independen dalam konteks UK.

Mekanisme tata kelola ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. POJK (2015) menyatakan bahwa salah satu anggota komite audit wajib memiliki sekurangnya 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan

keuangan. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan lebih dalam melakukan evaluasi kualitas pelaporan keuangan dan memahami penilaian auditor (Liu, 2105). Penelitian Defond, dkk. (2005) menunjukkan bahwa adanya ahli akuntansi dalam komite audit menimbulkan dampak positif di pasar, sedangkan komite audit yang tidak memiliki keahlian di bidang akuntansi yang hasilnya tidak mendapatkan respon. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas komite audit dipengaruhi oleh komite audit dengan latar belakang atau pengalaman di bidang akuntansi. Hasil penelitian Abad dan Bravo (2018) dan Liu (2015) menyatakan bahwa keahlian akuntansi dan keuangan dalam komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi forward-looking. Liu (2015) menyatakan bahwa semakin banyak ahli keuangan dalam komite audit dapat membuat pengawasan dan mekanisme pengendalian menjadi semakin ketat dan/atau mendorong manajer melakukan pengungkapan, salah satunya yaitu pengungkapan informasi forward-looking.

Pemilihan variabel dependen pengungkapan informasi *forward-looking* dilatarbelakangi karena penelitian mengenai pengungkapan informasi *forward-looking* di Indonesia masih sedikit. Variabel kepemilikan manajerial, direktur independen, serta ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit dipilih karena ketiga variabel tersebut memiliki hasil penelitian yang cenderung konsisten dari penelitian terdahulu. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan berturut-turut selama periode 2014-2018. Sektor manufaktur merupakan sektor dengan persentase tertinggi dalam perusahaan yang terdaftar di BEI. Dasar tersebut menjadi alasan penggunaan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi forward-looking?

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*?

- 2. Apakah direktur independen berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*?
- 3. Apakah ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap
pengungkapan informasi *forward-looking*, serta untuk menguji dan menganalisis:

- 1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi forward-looking.
- 2. Pengaruh direktur independen terhadap pengungkapan informasi forward-looking.
- 3. Pengaruh ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Berguna sebagai acuan dan menjadi pembanding bagi penelitian sejenis, yaitu pengaruh kepemilikan manajerial, direktur independen, dan ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan kepada manajemen perusahaan, dan pihak yang berkaitan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, direktur independen, dan ahli akuntansi dan keuangan) dalam komite audit terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* sehingga perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang relevan dalam pengungkapan informasi *forward-looking*. Sebagai tambahan pengetahuan untuk investor mengenai pertimbangan untuk melakukan

investasi dalam perusahaan yang tepat dengan mempertimbangkan tata kelola perusahaan (yang terdiri atas kepemilikan manajerial, direktur independen, dan ahli akuntansi dan keuangan komite audit) dan pengungkapan informasi *forward-looking*.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan skripsi yang dibagi menjadi lima bab, yang terdiri atas:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini diadakan, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat praktis dan akademis, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi, pengembangan hipotesis penelitian, dan model penelitian yang akan digunakan.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang desain penelitian, penjelasan identifikasi variabel, penjelasan definisi variabel, dan pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel, jenis dan sumber data, metode untuk mengumpulkan data, populasi, sampel, teknik penyampelan, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi tentang karakteristik mengenai objek penelitian, hasil statistic deskriptif, hasil analisis data setelah olah data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab lima berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan penelitian, keterbatasan yang timbul, dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.